

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru adalah kebijakan penggunaan wajib helm yang merupakan satu persoalan nasional yang cukup signifikan pada awal diperkenalkannya. Pasalnya kebijakan tersebut banyak mendapat tantangan dalam upaya penerapannya. Sejak tahun 1970 atas dasar ide Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam, penggunaan helm mulai digaungkan di seluruh Indonesia.¹ Hingga pada dikeluarkannya Maklumat kapolri bertarikh 7 Agustus 1971 sebagai peraturan pertama yang secara resmi mengajak masyarakat untuk menggunakan helm. Namun sepanjang tahun 1970-an kebijakan ini mandeg dan hilang dari edaran penetapannya.²

Baru pada 1985 pemerintah kota Ujung Pandang mengeluarkan peraturan penggunaan wajib helm melalui Intruksi Gubernur NO: 133/XII/1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengaturan jalur wajib Helm bagi kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan, serta penjelasan Kapolda Sulselra mengenai masalah lalu lintas.³ Melihat bagaimana jumlah korban kecelakaan tanpa helm pada tahun 1984 mencapai 244

¹ Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam yang menjabat sejak tahun 1968-1971 bertugas menemani presiden Soeharto di tahun 1970 berkunjung ke Eropa. Di sana beliau mendapat ide untuk menerapkan penggunaan helm di Indonesia setelah melihat masyarakat Eropa sudah banyak yang menggunakan helm.

Harian Fajar, 1986. "Helm dan Bebannya." hlm.4.

Harian Fajar, 1986. "Penjelasan Kapolda Mengenai Masalah Lalu Sulsel." No. 383.



orang.⁴ Sementara untuk tahun 1985 terdapat 259 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan pengendara tanpa menggunakan helm.⁵ Bersamaan dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur mengenai penggunaan wajib helm 1985, sudah terjadi aksi protes oleh mahasiswa dan masyarakat.⁶

Di Ujung Pandang sendiri harapan rakyat hanya bergantung pada kajian dunia kampus yang kritis yang setiap waktu membahas mengenai kejadian dan fenomena kehidupan negara dan pemerintahan lokal. Momentum kebijakan penggunaan wajib helm ini memancing kemarahan mahasiswa atas dasar alasan yang cukup beragam. Pada tahun 1987 puncak kerusuhan helm terjadi di Ujung Pandang yang digerakkan oleh mahasiswa. Beberapa kota yang ada di Indonesia melakukan protes terhadap kebijakan tersebut, tetapi kerusuhan besar hanya terjadi di Ujung Pandang.⁷ Demikian, kebijakan penggunaan wajib helm di kota Ujung Pandang dilihat sebagai yang signifikan. Bahwa mengapa kebijakan penggunaan wajib helm menyulut kemarahan dan kerusuhan dari mahasiswa? Bukankah alasan kebijakan tersebut cukup dapat diterima sebagai upaya mengurangi korban kecelakaan lalu lintas?

Sepanjang diupayakannya penerapan penggunaan wajib helm di Ujung Pandang rangkaian protes menyertai jalannya kebijakan tersebut. Namun kenapa

⁴ *Harian Fajar*, 1986. "Helm Bukan untuk Gagah-gagahan Seperti Chips." No. 353.

⁵ *Harian Fajar*, 1986. "Korban KLL di Sulsel Terbanyak Pelajar Mahasiswa." No. 470.



Tempo, 1987. "Setelah Protes Antihelm." hlm. 34.

Wawancara dengan Ramli S Nawi, 68 Tahun. Makassar, 23 September

baru pada tahun 1987 puncak dari protes kebijakan tersebut dilaksanakan? Apakah perlawanan anti helm terjadi karena adanya profokasi dari pihak tertentu kepada mahasiswa, atau memang murni dilakukan atas dasar penolakan kebijakan penggunaan wajib helm tersebut?

Dilansir dari media berita *Tempo* bahwa seorang pengendara tidak berani memakai pelindung kepala/helm yang nantinya akan menyulut aksi lagi.⁸ Kekhawatiran pengendara motor tersebut memberikan kesimpulan bahwa aksi kerusuhan atas perlawanan mahasiswa Ujung Pandang apakah benar karena untuk menyalurkan aspirasi masyarakat? Sementara masyarakat sendiri tidak berani memakai helm demi menekan timbulnya aksi kerusuhan, sehingga apakah alasan utama dari perlawanan menolak wajib helm? Atau faktor apakah yang kemudian membawa mahasiswa pada perlawanan yang begitu besar pada tahun 1987?

Diketahui dari pernyataan ketiga narasumber bahwa kampus yang terlibat aksi pada kerusuhan anti helm meliputi kampus UNHAS (Universitas Hasanuddin), waktu itu masih berlokasi di Jl. Sunu daerah Barayya yang sekarang berdiri Masjid Al-Markaz. Kemudian IKIP (sekarang Universitas Negeri Makassar) di daerah Gunungsari, UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Jl. Urip Sumohardjo dan Jl. Kakatua depan TVRI. Adapun UVRI (Universitas Veteran Republik Indonesia, kini UPRI) di Jl. G. Bawakaraeng.⁹ Kampus-kampus tersebut



Tempo, 1987. “Setelah Protes Antihelm.” hlm. 34.

Wawancara dengan Dahlan Abu Bakar 71 Tahun 21 September 2024, Nawi 68 Tahun 23 September 2024, dan Juliadi Hakim 3 Oktober 2024.

bergerak atas nama Mahasiswa Makassar.¹⁰

Demo yang kemudian menimbulkan kerusuhan besar di jalan-jalan kota Makassar menggambarkan besarnya massa mahasiswa dari berbagai kampus. Dalam catatan statistik 1987 diketahui pada tahun 1985/1986 ada total 14.631 jumlah mahasiswa di Universitas Hasanuddin, kemudian di tahun 1986/1987 jumlah keseluruhan mahasiswa di Universitas Hasanuddin mencapai 15.864. Sementara IKIP Ujung Pandang pada tahun 1985/1986 ada total 9.982 jumlah mahasiswa, kemudian bertambah 10.866 di tahun 1986/1987. Adapun Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1985/1986 mahasiswanya total berjumlah 13.532 namun pada tahun 1986/1987 hanya berjumlah total 8.456. Sedangkan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) pada tahun 1985/1986 mahasiswanya total berjumlah 5.799 dan di tahun 1986/1987 bertambah menjadi 5.856 total jumlah mahasiswa.¹¹

Sementara aksi kerusuhan anti helm pertama kali diusung oleh kampus IKIP pada 31 Oktober 1987 yang berlokasi di daerah Gunungsari, pembakaran helm terjadi di bagian selatan Pettarani sekarang.¹² Pada tahun 1987/1988 total jumlah mahasiswa FPIPS (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) IKIP Ujung Pandang mencapai 2.564, merupakan jumlah yang paling besar mahasiswanya dibandingkan dengan fakultas lain. Posisi kedua dengan jumlah

¹⁰ Juliadi Hakim ketua BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia yang menghimpun semua mahasiswa atas nama Mahasiswa Makassar untuk berkonsolidasi dan bergerak.



Badan Pusat Statistik. *"Sulawesi Selatan dalam Angka '7"*. hlm.147,159 dan 170

Wawancara dengan Juliadi Hakim, 21 September 2024.

mahasiswa terbanyak yaitu FPMIPA (Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dengan total 2.313 mahasiswa. Sementara urutan ketiga terbanyak berada di FPBS (Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra) dengan total jumlah mahasiswa sebesar 1.966.¹³ Jika dilihat dari ketiga fakultas ini, mahasiswa ilmu pengetahuan sosial dan mahasiswa bahasa dan sastra merupakan mereka dengan karakteristik yang senang mengkaji atau peka terhadap isu-isu sosial. Besarnya jumlah mahasiswa per fakultas juga menentukan besarnya partisipasi mahasiswa dalam kerusuhan anti helm yang diusung pertama kali di kampus IKIP.

Menyusul aksi kericuhan yang dilakukan oleh kampus II UMI di ruas Jl. Urip Sumoharjo yang menggiring massa ke kantor DPRD Provinsi. Salah seorang penggerak aksi kampus UMI dan mengajak kampus-kampus lain untuk berkonsolidasi yaitu Juliadi mahasiswa Teknik UMI bersama dengan kelompok organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Meskipun pada tahun 1987 jumlah mahasiswa kampus UMI tidak lebih banyak dengan ketiga kampus lainnya yang ikut aksi tetapi mereka mampu menghimpun massa yang lebih besar dari kampus-kampus lainnya.

Adapun kampus UNHAS pada tahun 1987/1988 merupakan kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak, kampus UMI juga menghimpun massa dari UNHAS. Tahun tersebut mahasiswa terbanyak jumlahnya adalah Fakultas Teknik sebesar 2.211, kemudian Fakultas Ekonomi 1.916, Fakultas Sastra sebanyak



Badan Pusat Statistik. *"Sulawesi Selatan dalam Angka 1987"*. hlm.147

1.571 dan Fakultas Hukum dengan jumlah mahasiswanya mencapai 1.516.¹⁴ Keempat fakultas tersebut menunjukkan banyaknya mahasiswa dengan kepekaan terhadap isu wajib helm ini, baik dari kalangan pemikir dan pengkritik agaknya mereka mahasiswa sastra dan hukum maupun dari kalangan mahasiswa teknik yang lebih aktif dan agresif dalam bertindak.

Dengan melihat data jumlah statistik banyaknya mahasiswa di empat kampus tersebut antara tahun 1985-1987 dapat memberikan kesimpulan bahwa rangkaian aksi protes atas dasar kebijakan penggunaan wajib helm sangat dipengaruhi oleh banyaknya massa mahasiswa. Dimana banyaknya jumlah mahasiswa berpeluang besar memiliki lebih banyak pula aktivis di dalamnya. Pertambahan jumlah mahasiswa di kampus-kampus tersebut menggambarkan bagaimana setiap tahun agaknya protes anti helm semakin membesar hingga menemui puncaknya pada tahun 1987. Terkecuali kampus UMI yang total jumlah mahasiswanya berkurang di tahun berikutnya. Tetapi tidak mengurangi seberapa banyak dan kuatnya massa yang dihimpun apabila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak di ketiga kampus lainnya.

Dalam mencari jawaban untuk persoalan kebijakan penggunaan wajib helm dan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa, dapat dilihat dalam konteks transformasi struktural yang mempengaruhi hubungan antara dua pihak. Demikian dalam konteks tersebut, maka dapat mengacu pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perubahan sejarah.¹⁵ Dalam konteks mengenai



Badan Pusat Statistik. *"Sulawesi Selatan dalam Angka 1987"*.hlm.166

Sartono Kartodidjo.1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi*

kebijakan penggunaan wajib helm dan perlawanan mahasiswa dapat dilakukan pendekatan pada strukturalisme, di mana hubungan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah mempengaruhi perubahan sosial di kota Makassar.

1.2.Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perlawanan dan kerusuhan di Makassar dalam menolak kebijakan penggunaan helm 1987?
2. Bagaimana kebijakan helm dilahirkan dan dijalankan pada tahun 1985-1988?

1.3 Batasan Masalah

Batasan penelitian dalam sejarah mencakup batasan Spasial yaitu batasan tempat, batasan temporal atau waktu, serta batasan konseptual. Dalam penelitian ini maka kota Makassar menjadi batasan wilayah atau spasialnya. Demikian, karena untuk menghindari meluasnya kajian mengenai suatu konsep sehingga tidak sistematis dan terstrukturnya batasan masalah-masalah yang dicari. Selain itu Makassar dipilih sebagai salah satu wilayah yang laju pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan provinsi. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di Sulawesi Selatan pada masa gerombolan. Sehingga pada masa kota Makassar memasuki wajah modernnya dapat dilihat bagaimana kota tersebut menjadi kota yang kosmopolitan dan dihadapkan dengan upaya pembangunan Orde Baru yang

berbagai permasalahan sosial dan ekonomi lainnya. Utamanya

(Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama., 1993) hlm. 161.



permasalahan kesemrawutan lalu lintas yang berpotensi meningkatkan jumlah kecelakaan, sehingga dilihat perlu untuk menerapkan penggunaan helm.

Selanjutnya batasan temporal atau waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah periode 1985-1988. Tahun 1985 dilihat sebagai tahun bagi diperkenalkannya penggunaan wajib helm atas instruksi Gubernur No.:133/XII/1985 tanggal 13 Desember 1985. Tahun tersebut menjadi tahun dimulainya penolakan dan protes di kalangan masyarakat dan mahasiswa.

Sementara tahun 1980-an menjadi tahun yang signifikan bagi terwujudnya modernitas dan pembangunan di kota Makassar sejak diwacanakannya pada 1970. Seiring dengan prospek pembangunan di era orde baru ini, perlawanan demi perlawanan digencarkan oleh mahasiswa..

Adapun batasan konseptualnya adalah kebijakan wajib helm dan perlawanan yang ditimbulkannya di kota Ujung Pandang, di mana yang signifikan dari konsep tersebut adalah bagaimana kebijakan penggunaan wajib helm didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Ujung Pandang pada tahun 1985, yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm. Kebijakan ini mencakup proses implementasi serta tujuan dan dampaknya dalam konteks sosial pada tahun tersebut. Adapun perlawanan mahasiswa adalah yang timbul dari kebijakan tersebutl ekonomi.

1.4 Tujuan Penelitian



menjelaskan latar belakang, serta implementasi kebijakan penggunaan wajib helm di Makassar pada tahun 1985-1992. Serta alasan pemerintah

menerapkan kebijakan wajib helm.

- b. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perlawanan anti helm di Makassar 1987.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah dan respon masyarakat.
- b. Sebagai referensi kepada pembuat kebijakan mengenai bagaimana kebijakan publik dapat diterima atau ditentang oleh masyarakat, terutama generasi muda.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Buku yang ditulis oleh Francois Raillon yang berjudul “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia (Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974)”, merupakan salah satu studi yang mendalam mengenai dinamika gerakan mahasiswa Indonesia pada masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru. Raillon menyoroti peranan mahasiswa sebagai aktor utama yang menuntut adanya peralihan politik dan kekuasaan serta gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai kekuatan moral-politik yang mendorong peralihan kekuasaan.

Buku yang ditulis oleh Ramli S Nawi yang berjudul “Daily Notes a Journalist (Catatan Harian Seorang Jurnalis)”, 2023. Buku ini membahas



i catatan-catatan seorang wartawan yang telah banyak menyaksikan -peristiwa sejarah dalam gelanggang dunia pers. Buku tersebut ya lebih berorientasi pada aspek romantika, mengenai suka duka menjadi

seorang wartawan. Pada salah satu bagian bab bukunya, secara khusus menceritakan mengenai kerusakan helm di Ujung Pandang pada tahun 1987. Ini dapat membantu melihat peristiwa kerusakan anti helm dari kaca mata seorang wartawan.

Buku yang ditulis oleh Sukriansyah S Latif, Tomi Lebang dengan judul “Amuk Makassar”, 1998. Buku tersebut membahas mengenai peristiwa-peristiwa kerusakan besar yang pernah terjadi di era Orde Baru, bagaimana kerusakan terjadi selalu bersentuhan dengan aspek budaya dan bersenggolan dengan sentimen Cina. Salah satu bagiannya membahas mengenai kerusakan anti helm di Ujung Pandang, namun yang membedakan tulisan tersebut adalah tidak memiliki struktur yang kronologis.

Adapun tulisan yang ditulis oleh Muhammad Maiwan yang dituang dalam artikel jurnal ilmiah yang berjudul, *Gerakan Mahasiswa di Indonesia dalam Bingkai Kekuasaan Orde Baru (1966-1998)*, 2014, membahas mengenai gerakan-gerakan mahasiswa atau kelompok terdidik dalam perubahan politik periode orde baru. Tulisan ini menggambarkan mengenai hubungan antara mahasiswa dengan militer, sehingga membantu untuk menganalisis alasan-alasan di balik perlawanan mahasiswa terkait kebijakan penggunaan wajib helm di Makassar tahun 1987.

1.6.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam tulisan ini mengacu pada pertanyaan mengapa perlawanan anti helm oleh mahasiswa di kota Ujung Pandang pada 1987? yang signifikan dari timbulnya pertanyaan tersebut adalah bagaimana sederhana “kebijakan wajib penggunaan helm” memicu reaksi yang



begitu besar dari mahasiswa dan masyarakat. Tentunya alasan perlawanan tersebut tidak begitu sederhana, ada alasan-alasan lain yang menjadikan persoalan helm begitu rumit dalam beberapa periode.

Demikian persoalan dari penggunaan wajib helm ini dilihat sebagai bagian yang penting pada tahun 1985 di era orde baru. Dimana di tahun-tahun tersebut, sering terjadi gejolak protes dan kritik dari mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Konsep gerakan mahasiswa dalam penelitian ini penting untuk memahami peran mereka sebagai agen perubahan sosial, serta cara-cara mereka mengorganisasi perlawanan dan memobilisasi dukungan.

Untuk memperoleh salah satu asumsi sebagai sebuah alasan atas rumusan masalah yang ada maka perlu terlebih dahulu mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan sosial ekonomi di kota Ujung Pandang sebelum perlawanan anti helm berlangsung. Latar belakang kehidupan sosial ekonomi di kota Ujung Pandang yang selanjutnya dapat menjelaskan alasan pemerintah mengeluarkan peraturan wajib penggunaan helm serta alasan masyarakat dan mahasiswa menolak dan melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut. Setelah diperoleh sebuah asumsi maka kemudian melihat bagaimana kebijakan pemerintah bermanfaat bagi masyarakat secara berkepanjangan atau malah tidak ada keberhasilan dari kebijakan tersebut.

1.7 Metode Penelitian



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan historis. Metode historis meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber,

verifikasi, interpretasi dan kemudian historiografi atau penulisan sejarah.

Topik yang dipilih adalah mengenai persoalan sosial dalam masyarakat perkotaan. Kemudian dilakukan tahap mengumpulkan sumber, baik sumber primer maupun sekunder yang membantu mencari rumusan masalah dari topik yang dipilih. Kemudian permasalahan yang ditemukan adalah “Mengapa terjadi perlawanan anti helm di Ujung Pandang tahun 1987?”

Dari rumusan masalah yang ditemukan adalah kemudian menentukan judul penelitian dengan mengangkat kebijakan wajib penggunaan helm sebagai fokus pada penelitian, karena wajib helm merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah orde baru yang diimplementasikan di kota Ujung Pandang pada 1985. Dimana helm dianjurkan sebagai solusi mengurangi potensi kecelakaan di kota-kota besar, termasuk Makassar.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan di atas maka dilakukan kembali pencarian sumber, baik primer maupun sekunder. Selanjutnya sumber- sumber yang ada diverifikasi kebenarannya dan valid atau tidaknya. Setelah itu dengan semua sumber yang ada maka masuk pada tahap menafsirkan atau menginterpretasi sebuah sumber dan tahap terakhir adalah penulisan sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I, meliputi pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



membahas mengenai gambaran kehidupan sosial politik secara umum

pada periode orde baru maupun secara khusus di Sulawesi Selatan dan kota Ujung Pandang, serta bagaimana kebijakan peraturan helm dilahirkan.

BAB III, membahas mengenai kehidupan sosial kampus di Ujung Pandang.

BAB IV, membahas mengenai Perlawanan mahasiswa terkait demo anti helm dan dampaknya.

BAB V, berisi hasil atau kesimpulan dari pembahasan I sampai IV yang merangkum secara keseluruhan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian, sekaligus bab ini menjadi penutup.



BAB II

KONTEKS SOSIAL POLITIK DAN LAHIRNYA KEBIJAKAN WAJIB HELM DI UJUNG PANDANG

2.1 Latar Belakang Sistem Politik Ekonomi dan Berdirinya Orde Baru

Setelah periode Orde Lama, muncul kemudian masa yang menamakan dirinya sebagai Orde Baru. Di mana periode tersebut menampilkan dirinya sebagai solusi dari rusaknya Orde Lama yang dikuasai oleh Soekarno. Orde Baru juga yang selanjutnya menjadi proses panjang dari munculnya gerakan-gerakan mahasiswa utamanya sejak tahun 1967 hingga tumbangnya Orde Baru tahun 1998.

Disamping kerusakan ekonomi yang membebankan Orde Baru, kerusakan politik yang sangat kompleks dilihat perlu untuk diatasi. Sebelum Soeharto resmi menjadi presiden menggantikan Soekarno, rezim Orde Lama memperlihatkan bagaimana rumitnya perpolitikan yang ditandai oleh perdebatan panjang tentang ideologi yang berujung pada kesia-siaan, kekuatan komunis yang terus meningkat, serta ketidakefektifan pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah di daerah, dan perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta yang kemudian menyebabkan munculnya gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi.

Dalam konflik yang mengancam keutuhan republik dan pembebasan Irian Barat, Angkatan Darat telah merasa sangat jauh dilibatkan dan ketika si liberal gagal melibatkan Angkatan Darat dalam format politiknya, kemudian mulai mencari rumusan pembenaran atas kehadiran Angkatan



Darat dalam bidang nonmiliter sejak tahun 1952 dengan upaya yang gagal memaksa Soekarno untuk membubarkan parlemen. Hal inilah yang kemudian menjadi titik awal berkuasanya Orde Baru yang meligitimasi peranan kuat Angkatan Darat.

Kemudian apa yang menjadi dasar perencanaan masa depan pemerintahan baru di Indonesia adalah yang dianggap harus bertolakbelakang dari pola rezim yang lama. Penanganan yang perlu dilakukan adalah bagaimana menstabilkan kembali perekonomian yang telah jatuh. Untuk mengupayakan terwujudnya produktivitas perekonomian, maka mekanisme perpolitikan juga harus terkendali yang kemudian dirumuskan suatu sistem politik yang “tertib”.

Pada bulan November 1965, kelompok intelektual dari Universitas Indonesia yang sebagian besar adalah Guru Besar Ekonomi dan didukung oleh para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sama-sama mengkritik mengenai perekonomian masa Soekarno. Penguraian kritik tersebut dituang dalam buku dan seminar yang disponsori oleh mahasiswa dan Guru Besar ekonomi serta diperkuat oleh dukungan Angkatan Darat melalui seminar kedua 25-31 Agustus 1966 yang menjadi titik awal diterapkannya program stabilitasi pada 3 Oktober 1966.¹ Namun rumusan program stabilitasi sebenarnya tidak mudah diterima, muncul berbagai kontra dan ketidaksepakatan mengenai rumusan tersebut. Terlebih bagaimana Indonesia sulit

t kepercayaan lagi dari bantuan luar negeri, karena terlepas dari

Mohtar Mas'ood. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1968* (Jakarta: PT Gramedia, 1989) hlm, 63-64.



kerusakan ekonomi Orde Lama. Meski demikian, pemerintah Orde Baru terus berupaya untuk berdipolomasi untuk mendapatkan bantuan asing.

Pada 3 Oktober 1966, dengan bantuan para ahli IMF dan para ekonom Indonesia membuat beberapa peraturan khusus tentang stabilitasi ekonomi dan disusul peraturan lainnya pada tanggal 10 Februari 1967 serta 28 Juli 1967 sebagai perluasan. Mohtar Mas'ood (1989) menyebutkan beberapa peraturan itu, mencakup pemotongan belanja dan perbaikan pengumpulan pajak serta penghapusan subsidi dan penyesuaian harga. Sementara peraturan ekonomi juga ada pada kebijakan moneter yang mencakup kebijaksanaan pengetatan uang dan kebijaksanaan tabungan deposito. Kemudian yang paling bertolakbelakang dari Orde Lama adalah bagaimana Orde Baru menetapkan aturan dari program stabilitas ekonomi dengan membuka diri terhadap bantuan dan penanaman modal asing pun juga sistem liberalisasi perdagangan luar negeri

Peraturan mengenai sistem stabilitasi tersebut yang memancing kritikan dan penentangan dari kalangan masyarakat bisnis pribumi dan para pendukung mereka dalam partai-partai politik serta di perguruan tinggi. Perdebatan tersebut berlangsung selama 1967-1968. Pasalnya, peraturan tersebut dapat berdampak negatif terhadap para pengusaha kecil dan menengah yang kebanyakan adalah pribumi.² Bagaimana tidak, dalam program tersebut perlakuan istimewa terhadap pengusaha pribumi dihapuskan dan condong kepada pengatasan masalah ekonomi



Dalam artian, kebijaksanaan liberal tersebut hanya akan memperkuat

Ibid., 75.

sektor modern yang lebih efisien.

Kebijaksanaan ekonomi semacam ini memberikan prestasi dalam kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan tinggi pada Orde Baru, tetapi pada kenyataannya memberikan kerugian yang sejak sebelumnya diprediksikan. Strategi stabilitasi ekonomi nyatanya tidak menyelesaikan masalah-masalah dasar ekonomi Indonesia. Seperti pengangguran, di mana urbanisasi yang terus meningkat tidak diikuti dengan perluasan lapangan kerja, kebangkrutan bisnis pribumi selama akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Ada sebanyak 9.517 perusahaan bangkrut selama periode 1969-1970.³ Akibat kerugian ini, pada akhir tahun 1967 kelompok mahasiswa dan pemuda mulai turun ke jalan dan memprkarsai demonstrasi massa.

Pertikaian mengenai strategi ekonomi dan persoalan politik lainnya banyak menyulut protes yang mengharuskan pemerintah untuk menggunakan tindakan-tindakan yang represif. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa untuk mentsabilkan perekonomian, maka perlu menciptakan suatu sistem politik yang mendukung kebijaksanaan ekonomi.

Untuk menciptakan tertib politik yang jauh dari peluang mengancam kestabilan perekonomian, maka pembinaan ulang ideologi dilihat perlu dilakukan untuk membenarkan usaha pembangunan dan peranan militer di dalamnya. Dalam hal ini, Ideologi Pembangunan dan Dwi-fungsi ABRI sebagai pandangan



Ibid., hlm.116-119.

alternatif untuk melepaskan konflik-konflik Ideologi pada rezim Orde Lama. Untuk menghindari terulangnya konflik ideologi, Soeharto mengambil langkah untuk menyederhanakan multipartai sebelumnya yang menjadi sebab dari beragamnya pandangan ideologi yang berbeda. Golkar dikukuhkan sebagai partai yang sangat dominan di mana sekbernya sebagian besar adalah militer Angkatan Darat.

2.2. Kondisi Perpolitikan di Sulawesi Selatan Periode Orde Baru.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Sulawesi Selatan dan Tenggara mengalami situasi yang cukup signifikan, ditandai dengan berbagai ancaman keamanan. Baru pada peristiwa terbakarnya Kahar Muzakkar tahun 1965 dan penumpasan elemen-elemen PKI pada 1966, Sulawesi Selatan sudah mulai stabil dari ancaman keamanan. Kedua tahapan ini, lazim disebut sebagai periode PEPELRADA (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) sejak 14 September hingga permulaan Orde Baru.⁴

Sejak tahun 1960 hingga 1966, yaitu ketika menjabatnya A. Achmad Rifai sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan, menandai suatu periode dengan kepemimpinan yang birokratis dan merakyat. Model kepemimpinan tersebut cukup dipengaruhi oleh situasi di mana Sulawesi Selatan dan Tenggara sampai Sulawesi Selatan berada dalam



Zainuddin Taha. 2017. *Sulawesi Selatan dari Achmad Rifai ke Achmad 50-1970*. (Badan Penerbit UNM, 2017) hlm, 33.

kondisi yang berkecamuk. Di mana sipil pada waktu itu turut serta bersama angkatan bersenjata dalam melawan segala bentuk ancaman keamanan.

Adapun peralihan kepemimpinan yang cukup signifikan dimulai sejak tergantinya Gubernur A. Achmad Rifai ke Gubernur Letkol. Inf. Achmad Lamo (1966-1978). Masa tersebut merupakan transisi pemerintahan dari sipil ke militer, yang mana model pemerintahan Achmad Lamo menyesuaikan dengan gaya Orde Baru. Pada periode tersebut, militer banyak mengambil alih peran dan posisi strategis dalam pemerintahan dan menjadikan sipil dalam posisi subordinasi. Sesuai dengan keputusan Presiden (Keppres)/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No. 179/KOTI/1965, berubah kewenangannya menjadi lembaga yang mengawasi pemberitaan, pengamanan proses Pemilihan Umum (Pemilu), menangkap, mengintrogasi dan menahan.

Keselewengan Orde Baru mulai tampak pada tahun 1969 hingga menjelang awal 1970 melalui rekayasa politik dengan penyederhanaan kepartaian dan dominasi dari sekber Golkar. Kekuatan-kekuatan politik di luar dari sekber Golkar menjadi sulit berkembang, hingga pada tahap di mana BPH (Badan Pemerintah Harian) ditiadakan. Sementara itu pada kondisi di mana DPRD Sulawesi Selatan tidak sejalan dengan kebijakan tersebut, tetapi dengan terpaksa penggantian BPH harus dijalankan. Gubernur Achamd Lamo merelakan anggota-anggota BPH-nya diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Rekayasa politik dijadikan sebagai



jembatan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dengan mengorbankan demokratisasi, kemanusiaan dan keadilan.⁵

Demokratisasi, kemanusiaan dan keadilan, ketiganya merupakan korban dari represifnya Orde Baru. Di mana mahasiswa dan pers ditekan dalam kebebasan berpendapat, tidak harmonisnya hubungan antara mahasiswa dan ABRI, serta bagaimana stabilitas ekonomi dan pembangunan yang tampak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja.

Ditekannya mahasiswa dan pers dalam berpendapat diawali ketika meletusnya peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974. Peristiwa Malari merupakan respon terhadap kebijakan Orde Baru yang dinilai condong kepada bantuan modal dan investasi asing. Akibatnya, peristiwa tersebut berdampak pada kebebasan pers. Surat Kabar yang dianggap dapat mengacau situasi politik dihapuskan, di antaranya surat kabar Harian KAMI, Abadi, Nusantara, Mingguan Senang, The Jakarta Times dan tujuh lainnya.⁶

Peristiwa Malari berdampak hingga ke Ujung Pandang. Di dinding-dinding kampus marak terlihat beberapa pamflet yang ditempelkan berisi kritikan dan tuduhan terhadap pejabat-pejabat daerah. Gerakan-gerakan demikian juga dilaksanakan sebagai bentuk perlawanan yang banyak dipimpin oleh para seniman

⁵ *Ibid.*, hlm. 155, 157.



Irmalasari. *Surat Kabar Kampus IDENTITAS Universitas Hsanuddin isa Orde Baru (1974-1992)* . (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 2023)., hlm.18.

dan wartawan melalui dukungan elemen pers di Ujung Pandang, salah satunya adalah Harian KAMI. Bersamaan dengan runtuhnya perlawanan di Jakarta, di Ujung Pandang pun demikian. Wartawan-wartawan yang diketahui berada di belakang demonstran ditangkap dan diberhentikan, serta surat kabar mereka ditutup.⁷

Demonstrasi mahasiswa kembali memuncak di tahun 1978 pasca memanasnya pemilu tahun 1977. Dari peristiwa tersebut, pemerintah Orde Baru kemudian memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih represif dengan mencetuskan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Langkah tersebut bertujuan untuk menertibkan dan menormalkan kembali kehidupan kampus seperti semula, bahwa kehidupan kampus yang sesungguhnya hanya fokus kepada kegiatan akademik.⁸

Di samping itu, dalam dunia kampus pers mahasiswa juga tidak luput dari pembredelan, meskipun jika masih ada, pers mahasiswa dikendalikan atau dikontrol oleh Dewan Mahasiswa (Dema) dan harus mendapat izin untuk setiap aktvitasnya dari Menteri Penerangan dan birokrat mahasiswa. Surat kabar kampus *Identitas* Universitas Hasanuddin salah satu surat kabar kampus yang sempat dilarang edarkan pada tahun 1978. Pasalnya surat kabar identitas pernah memuat tulisan yang berisi tentang dampak dari peristiwa Malari 1974. Tidak hanya

⁷ *Ibid.*



Mohammad Maiwan. 2014. “Gerakan Mahasiswa di Indonesia dalam Kekuasaan Orde Baru (1966-1998)”. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, No. 1. Hlm. 24.

pelarangan edar, penahanan sementara juga dilakukan terhadap pimpinan mahasiswa unhas.⁹

Kondisi tersebut, mengindikasikan bagaimana besarnya kekuatan ABRI dan kekuasaan pemerintah pada saat itu. Melihat Gubernur bahkan Walikota Ujung Pandang dijabat oleh seorang angkatan bersenjata yang keduanya sama-sama berpangkat sebagai Perwira Menengah. Kewenangan yang besar melibatkan kekuatan angkatan bersenjata, terutama Tentara. Mereka memiliki pengaruh besar dalam jalannya pemerintahan yang kekuatannya dipegang oleh Panglima Kodam.

Di Ujung Pandang, kekuatan tersebut dipegang oleh 4 Panglima Kodam dari Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin selama pemerintahan Gubernur Letkol. Inf. Achmad Lamo dan Walikota Kolonel (Purn) Daeng Patompo. Keempat Panglima Kodam XIV/Hasanuddin kesemuanya berpangkat Brigadir Jenderal TNI yang merupakan Perwira Tinggi AD, yang satu tingkat di atas Perwira menengah. Panglima Kodam TNI AD dari Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, yaitu termasuk Brigjen. TNI Sayidiman Suryohadiprojo (1968-1970), Brigjen. TNI. Abdul Aziz Bustam (1970-1973), Brigjen. TNI. Hasan Slamet (1973-1975), dan Brigjen. TNI. Sukma Endang (1975-1978).

2.3 Kondisi Sosial Masyarakat Ujung Pandang 1970-an

Di bawah pemerintahan Orde Baru stabilitas politik dan pembangunan



Irmalasari. *Surat Kabar Kampus IDENTITAS Universitas Hsanuddin sa Orde Baru (1974-1992)* . (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 2023)., hlm.19,74.

ekonomi menjadi hal yang paling utama dengan mengistimewakan modernisasi. Upaya modernisasi kota Ujung Pandang pertama kali dimulai ketika Kolonel (Purn) Daeng Patompo menjabat sebagai walikota Ujung Pandang 1968-1978. Di bawah pemerintahan Gubernur Letkol. Inf. Achamd Lamo, Daeng Patompo mencetuskan konsep pemberantasan 3K (Kemiskinan, Kebodohan, dan Kemelaratan).

Awal tahun 1970-an, Ujung Pandang membangun muka kota dengan persepsi Orde Baru. Pembangunan infrastruktur ditingkatkan, seperti perawatan fasilitas kota, dorongan kerja bakti untuk kebersihan, penertiban lalu lintas dan persoalan kriminalitas. Perusahaan Daerah (PD) Ujung Pandang kemudian menetapkan jalur angkutan umum dan penyediaan halte di sepanjang jalur tersebut sebagai realisasi penertiban lalu lintas. Penggabungan pasar-pasar dalam satu lokasi berpusat di Pasar Sentral dengan bangunan yang modern, penyediaan tempat sampah dengan model yang seragam untuk setiap bangunan, baik di hotel, restoran, maupun rumah tangga. Pemberdayaan masyarakat dan remaja dilakukan oleh (PMD) Pembangunan Masyarakat Daerah serta turut serta kepolisian dengan membangun klub-klub remaja.¹⁰

Pada tahun 1970-an, tata letak kota Ujung Pandang juga dikonsentrasikan seolah menurut pola aktivitasnya. Di mana, jalan Sumba Opu dekat pantai Losari merupakan jalan utama menuju pusat-pusat pertokoan dan wisata sebagai simbol



¹⁰ Ilham Daeng Makello. 2019. "Penyeragaman dan Wajah Buram itas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru". *Jurnal Sejarah Citra* Vol. 4 No. 1. Hlm. 17-19.

modernisasi. Kemudian masih sekitar pantai sebelah selatan Fort Rotterdam, yaitu jalan Penghibur yang menghadap ke tepi laut dipenuhi dengan toko-toko, bar-bar, restoran-restoran, dan klub-klub sebagai pusat kegiatan malam hari. Dekat bagian tengah kota seperti di sebelah tenggara kecamatan wajo terdapat toko barang eceran dan pasar-pasar dan di dekat laut bagian timur laut kecamatan Mariso terletak sebuah pasar ikan yang tidak jauh dari pusat pertokoan Sumbaopu.

Sementara pada bagian kota tua pada umumnya dipenuhi pemukiman dan jalan dengan mutu yang baik seperti di Tabaringan dan Paralayang serta Pattunuang dan Butung (keduanya terletak di bagian kota tempat tinggal orang Cina). Di bagian utara kota terdapat pemukiman dan jalan berdaya rendah seperti di Cambaya, Panampu (komuniti yang berkebun sayuran pada bagian tanah kampus Universitas), Mattoangin, Mariso, Lariang Bangi, Bara-baraya, Pisang Selatan, Pisang Utara, Maricaya Selatan dan Gaddong (Pemukiman yang cukup baik menghadap ke jalan utama dan pemukiman yang miskin memenuhi bagian tengah dari blok). Adapun yang paling bermutu buruk berada di daerah pinggiran sebelah tenggara dari daerah kota seperti Maricaya Selatan dan Mamajang.¹¹

Keadaan ini mencerminkan polarisasi kota Ujung Pandang yang berkelompok namun tidak terstruktur atau semrawut, bagian barat dan selatan merupakan pusat kota yang jalan-jalan utamanya membentang ke arah timur, utara dan selatan. Artinya memencar keluar dari pusat kota ke pinggiran kota. Jalan-



¹¹ W. Donald MCTaggart. 1976. "Kebijaksanaan Pembangunan Kota di la Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan". *Arizona State University*. lm. 93 & 95.

jalan utama tersebut meliputi jalan G Bawakaraeng, jalan Dr, Ratulangi, jalan Veteran, Jenderal Sudirman, jalan Urip Sumohardjo dan jalan A.P. Pettarani sekarang.



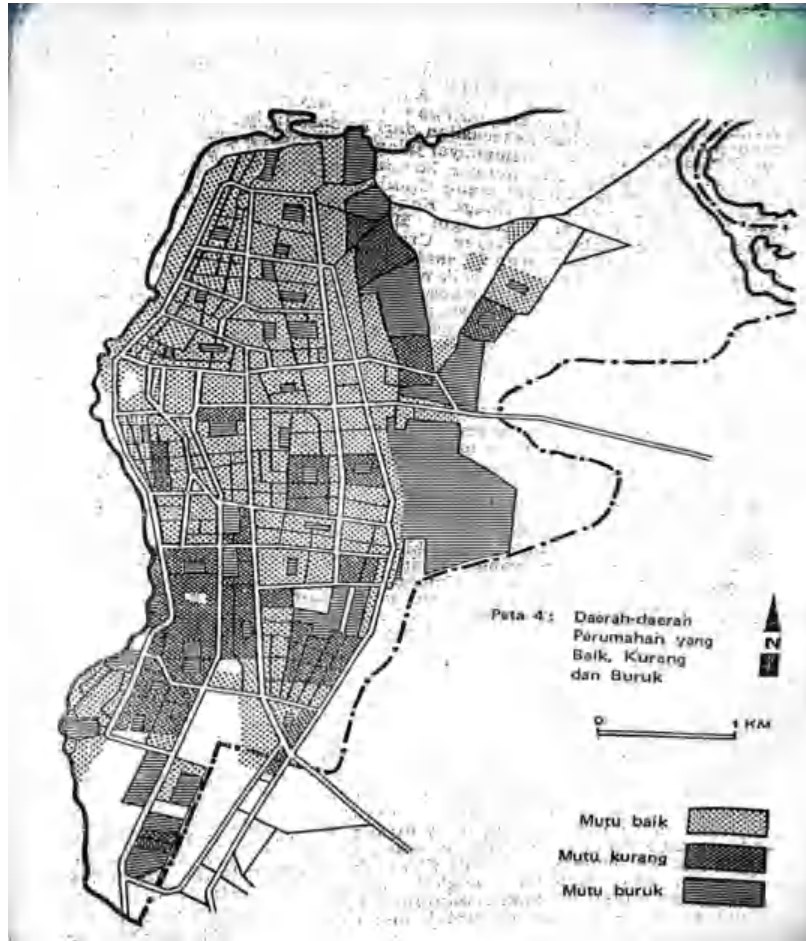


Foto 2.1 : Peta Kota Ujung Pandang 1970-an.

Sumber: Dalam artikel “Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.” Oleh W. Donald McTaggart.

Perumahan dalam modernisasi ruang penghidupan kota lebih menonjolkan pembangunan yang mahal dan bermodal besar di samping kelemahan ekonomi dan kemiskinan. Persoalan ini merupakan ketidaksesuaian dari peraturan-peraturan institutionil. Ujung Pandang menyoroti bagian nyata dari dualisme perkotaan, di mana adanya perbedaan yang kontras antara wilayah yang ni modernisasi (termasuk, pusat kota, area pemerintahan, dan kawasan



pelabuhan) dengan pemukiman padat yang minim infrastruktur serta pemukiman kumuh pinggiran kota.¹²

Sejak dicanangkannya pola dasar Pemberantasan 3K oleh walikota Daeng Patompo hingga menjabatnya Walikota Kol. Jancy Raib (1983-1988) di bawah kepemimpinan Gubernur Prof. Amiruddin (1983-1988) peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ujung Pandang masih menampilkan dualisme perkotaan. Sektor informal masih eksis menjadi penopang ekonomi utama masyarakat, orang-orang lokal seperti Makassar dan urban seperti Bugis atau dari daerah luar kota Ujung Pandang adalah kebanyakan merupakan pekerja di bidang ekonomi informal. Kepadatan penduduk kota tidak sejalan dengan kemampuan kota Ujung Pandang untuk menopang perekonomian masyarakatnya.

Rintangan-rintangan yang dihadapi dalam pembangunan kota tidak hanya mengenai maraknya persoalan sosial seperti kriminalitas perkotaan dan kemiskinan, tetapi juga atas perasaan-perasaan yang takut tersingkirkan di tengah proses menuju arah modernitas yang kemudian mengantarkan Ujung Pandang pada Perubahannya menjadi “Kota Makassar” di tahun 1999. Sepanjang rentan waktu Orde Baru, sejak 1971 utamanya tahun 1980-an merupakan suatu persoalan perkotaan yang diidentifikasi sebagai proses etnisasi kota Makassar. Dalam artian, ketika Ujung Pandang telah menemukan wajah modernnya, maka kota itu tidak



² *Ibid.*, hlm 101.

lagi milik suatu etnis tertentu saja, melainkan merupakan kota yang kosmopolitan yang ditempati oleh beberapa etnis dari berbagai daerah.¹³

2.4 Latar Belakang Kebijakan Wajib Helm

2.4.1. Kondisi Kecelakaan Lalu Lintas Sebelum Kebijakan

Diterapkan

Kota Ujung Pandang disebut sebagai kota yang memacu diri dan yang dipacu untuk maju.¹⁴ Situasi yang demikian juga sebagai gambaran bagaimana Ujung Pandang melihat berbagai permasalahan sosialnya, tidak hanya sebagai kota yang maju tetapi juga apa yang kemudian menjadi dampak dari kemajuan itu sendiri. Kerap kali upaya yang ditujukan untuk kemajuan dan kemodern-an kota Ujung Pandang tidak dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana yang ada.

Salah satu dari pembangunan kota Ujung Pandang yang belum sepenuhnya maksimal adalah kesemrawutan arus lalu lintas, seperti kecelakaan, kemacetan dan berbagai pelanggaran lalu lintas. Kesemrawutan ini disebabkan oleh volume kendaraan yang terus meningkat tetapi tanpa perbaikan sarana jalan. Selain itu tata letak pembangunan kota Ujung Pandang yang dinilai juga cukup semrawut. Seperti terpusatnya beberapa pusat perekonomian di dalam kota, bercampur baur

¹³ Dias Pradadimara. 2003. "Dari Makassar ke Makassar : Aspek Demografi dan Politik Proses "Etnisasi" Sebuah Kota." *Populasi*, Vol. 14 No.1. 15.

Berita Yudha, 1986. "Kodya Ujung Pandang Memacu Diri dan Dipacu aju." hlm.4.



dengan kawasan pemukiman penduduk.¹⁵

Masalah serius dari kesemrawutan lalu lintas di kota Ujung Pandang adalah angka kecelakaan yang cukup besar. Selama 5 tahun terakhir angka kecelakaan cukup memprihatinkan di wilayah Polda Sulselra. Kapolda Sulselra Brigjen Pol. Drs. Soebagjo mengungkapkan bahwa pada tahun 1980 tercatat angka kecelakaan setiap harinya mencapai 786 kasus. Kemudian di tahun 1981 angka kecelakaan yang menyebabkan kematian mencapai 509 orang. Untuk tahun 1982 ada 777 kasus kecelakaan dan di tahun 1983 meningkat hingga mencapai 826 kasus.¹⁶ Sementara itu, data yang ditampilkan oleh Mayor Polisi Drs. Faisal Hamzah menunjukkan pada tahun 1984 angka kasus kecelakaan mencapai 2.868, dan 1141 di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Dari semua kasus kecelakaan tersebut terbilang ada 79% berdampak pada cedera kepala.¹⁷

2.4.2. Faktor Utama yang Mendorong Penerapan Kebijakan

Sejak awal orde baru, pemerintahan berfokus kepada ekonomi pembangunan yang mengedepankan modernisasi perkotaan. Kemajuan yang diharapkan, dimaknakan dalam konsep modernitas yang seragam dan terkontrol. Modernitas di bawah orde baru dijalankan melalui instrumen birokratis, di mana pemerintah dapat mengatur dan mengontrol sampai ke tingkat yang paling bawah. Pada dekade kedua pemerintahan orde baru di Ujung Pandang model modernitas

¹⁵ *Harian Neraca*, 1987. "Arus Lalulintas Kota Ujungpandang Semrawut.

Pos Makassar, 1985. "Kecelakaan Lalulintas Memprihatinkan."

Identitas, 1986. "Setelah SIM, Kini Helm masuk Kampus." No.217.



lebih mengedepankan keserasian, mobilisasi dan keseragaman dalam ide dan sikap. Keseragaman yang diupayakan adalah untuk mengedepankan wajah kota yang rapi dan terbebas dari kesemrawutan. Termasuk pada dikempanyekannya kedisiplinan dalam berlalulintas tahun 1970-an dan aktivitas kerja bakti untuk membangun kota Ujung Pandang yang bersih.¹⁸

Penerapan kebijakan wajib helm secara nasional ditujukan lebih kepada agar terpenuhinya salah satu aspek kemodern-an, yaitu keseragaman sikap untuk menciptakan ketertiban kota-kota besar di Indonesia. Mulanya penggunaan helm pengaman hanya berlaku sebagai sesuatu yang dianjurkan. Anjuran ini berawal ketika Kapolri Jenderal Purn Hoengeng Imam yang menjabat sejak tahun 1968-1971 bertugas menemani presiden Soeharto di tahun 1970 dalam kunjungannya ke Eropa. Di sana beliau melihat masyarakat Eropa sudah banyak yang menggunakan helm pengaman dalam berkendara. Ide ini kemudian dibawa pulang ke Indonesia dengan maksud untuk diterapkan kepada masyarakat.

Setelah kepulangan Jenderal Purn Hoengeng Imam bersama presiden Soeharto pada waktu itu ke Indonesia, penggunaan helm mulai digaungkan sebagai sebuah anjuran. Baru pada tahun 1971 dikeluarkan pernyataan tertulis sebagai sebuah peraturan melalui Maklumat Kapolri bertarikh 7 Agustus 1971 yang resmi mengajak masyarakat untuk menggunakan helm. Namun, sepanjang



Ilham Daeng Makello. 2019. "Penyeragaman dan Wajah Buram as di Kota Makassar pada Masa Orde Baru". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, j. 1. Hlm. 16,18.

tahun 1970-an peraturan tersebut mandeg dan hilang dari edaran penetapannya.¹⁹

Dengan kenyataan semakin meningkatnya jumlah kecelakaan di Indonesia sejak tahun 1979 yang membawa korban sebanyak 300.000 orang lebih, maka di tahun 1980 penggunaan wajib helm kembali digaungkan dan semakin ditekankan sebagai sebuah kewajiban. Sementara sadar akan jumlah kecelakaan yang terus meningkat setiap tahunnya pemerintah kota Ujung Pandang mengeluarkan peraturan penggunaan wajib helm melalui intruksi Gubernur Prof. Ahmad Amiruddin NO: 133/IXX/1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengaturan jalur wajib helm bagi kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan, serta penjelasan Kapolda Sulselra mengenai masalah lalulintas.²⁰

2.5. Implementasi Kebijakan

2.5.1 Proses Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Wajib Helm

Himbauan penggunaan wajib helm di Ujung Pandang paruh kedua tahun 1980-an sebenarnya tidak dimulai dengan proses sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat helm terlebih dahulu. Memang, pada prosesnya dilakukan secara bertahap di beberapa jalur saja, namun sebelum keluarnya SK Intruksi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 1985 mengenai wajib helm, pemerintah maupun satlantas tidak melakukan sosialisasi dan edukasi tentang helm sebagai pelindung kepala saat berkendara. Penyampaian himbauan penggunaan wajib



Harian Fajar, 1986. "Helm dan Bebannya." hlm.4.

Harian Fajar, 1986. "Penjelasan Kapolda Mengenai Masalah Lalu Lintas" No.383.

helm mula-mulanya dikabarkan melalui stasiun tv dan radio. Sembari menetapkan beberapa jalur wajib helm terlebih dahulu dan bertahap, secara langsung juga dianggap sebagai bentuk dari sosialisasi mengenai manfaat helm.

Proses penerapan penggunaan wajib helm cukup panjang dan tidak mudah untuk dapat dipahami manfaat dan tujuannya oleh masyarakat. Penetapan jalur helm yang secara tiba-tiba di kota Ujung Pandang mendapat kecaman dari khlayak banyak. Utamanya mahasiswa menilai proses untuk menuju penggunaan helm secara menyeluruh terlalu terburu-buru dan tidak maksimal. Pemerintah merespon protes tersebut, hingga sosialisasi penggunaan wajib helm yang dimaksudkan ada dalam konteks turun langsung ke masyarakat direalisasikan dengan menargetkan mahasiswa terlebih dahulu, dimulai pada tahun 1985.

Sosialisasi dan temu muka penyebaran manfaat helm mula-mula dilakukan di kampus-kampus yang ada di Ujung Pandang. Penargetan tersebut karena mahasiswa dinilai sebagai kunci utama sebelum kemudian menyentuh kepada pemahaman masyarakat luas. Penyuluhan mengenai manfaat helm masih terus dilakukan bahkan setelah terjadinya kerusuhan anti helm tahun 1987. Sosialisasi terus dioptimalkan hingga tahun 1989, proses tersebut sedikit membuahkan hasil. Masyarakat perlahan mulai menerima peraturan tersebut dengan kesadaran akan keselamatan dalam berkendara.

2.5.2 Peran Kepolisian dan Instansi Terkait dalam Penegakan Aturan.



lelalui gambaran situasi masa Orde baru yang telah dibahas sebelumnya setiap ancaman yang bersifat mengganggu kestabilan pemerintahan dan

dianggap berpeluang melawan kebijakan peraturan akan dibarengi dengan pengawasan ketat dari berbagai jenis kekuatan yang resmi dalam pemerintahan seperti seluruh angkatan bersenjata.

Dalam upaya menciptakan keteraturan kota dalam konsep kemodern-an, kesemrawutan lalu lintas dan keseragaman ide dan sikap, helm dinilai begitu penting, selain sebagai salah satu bentuk nyata dari kemodern-an juga sebagai bentuk pencegahan dari kemungkinan semakin meningkatnya jumlah kecelakaan. Demikian, permasalahan seperti kesemrawutan lalu lintas dan ketidakteraturan masyarakat kota Ujung Pandang maka aparat keamanan serta beberapa instansi yang terkait sangat berperan penting dalam menciptakan kestabilan pembangunan kota, utamanya persoalan berlalu lintas.

Keterlibatan berbagai kekuatan resmi dalam pemerintahan tercermin dari kebijakan tertib berlalu lintas tahun 1985 yang dikenal sebagai Operasi Zebra. Konon, Kasat Binmas Polrestabes Ujung Pandang, Mayor Pol Wariman Gafur melancarkan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran berlalu lintas dengan mengikutsertakan berbagai instansi yang ada, dalam menindak para pelanggar. Di antaranya diturutsertakan tidak hanya Polantas tetapi juga Shabara (Samapta Bhayangkara), Brimob (Brigade Mobil), LLAJR (Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), Pemda (Pemerintah Daerah), hingga Staf.²¹ Hal tersebut dilakukan sebagai respon dari semakin banyaknya pengendara yang melakukan pelanggaran secara

terus dan tidak mentaati aturan yang ada.



Media Karya, 1985. "Melancarkan Arus Lalu Lintas Secara Intensif." hlm



Optimized using
trial version
www.balesio.com